SILATURAHMI DALAM BINGKAI BERLARI TIDAK PAKAI LAMA.

(oleh Idris Latif. Crew Jurdilaga PTA Jambi)

Mengikuti perjalanan satu hari Doktor (*Candidat*) H. Djajusman MS, SH., MH., MM.Pd Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi di Kabupaten Batang Hari dengan filosofi *serentak bak regam* yang bermakna *watak dan adat yang seiya sekata (musyawarah dan mufakat)* dalam melanjutkan gagasan berlari tidak pakai lama, sebuah ungkapan mengambil langkah menuju beberapa perbaikan, dan tidak pakai lama adalah sebuah gagasan yang melibatkan seluruh kekuatan yang ada dengan membagi habis tugas serta pencapaian target yang bisa di ukur dalam waktu yang relatif singkat.

Tatanan Nilai-nilai dalam berlari tidak pakai lama merupakan gagasan yang yang membuat rasa lebih nyaman dengan sistem manajemen yang relatif fleksibel, tidak kaku, dan tidak dijalankan di atas prinsip '*command and control*'. Pendekatan bergaya '*bottom up*' melalui pengembangan potensi dan sumber daya manusia yang ada yang menimalisir beberapa hambatan dengan penerapan kepada seluruh pegawai yang saling memberikan dukungan untuk sebuah tujuan bersama dalam era modern gagasan berlari tidak pakai lama mengadopsi kinerja yang menempatkan rantai komando yang tidak eksklusif dan telah memunculkan inovasi inovasi terbaik dari seluruh pegawai dan saling memberikan kontribusi untuk pencapaian hasil yang di harapkan.

Kunjungan bersilaturahmi ke negeri serentah bak regam mendapat respons positif dari Sinwan, SH orang Nomor 1 di Kabupaten Batanghari bersama jajaran forkompimda, Jajaran Sekretaris daerah beserta pemuka Adat, pemuka Agama, Kabupaten Muara Bulian dengan penyambutan tari sekapur sirih dengan kalungan bunga sebagai sebuah penghormatan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap orang Nomor 1 di jajaran Pengadilan Tinggi Agama di Jambi yang pertama kalinya berkunjung ke Muara Bulian ibu kota Kabupaten Batang Hari.

Kunjungan Ketua Pengadilan Agama Jambi ke Kabupaten Batang Hari adalah meningkatkan tali silatuhrahmi sekaligus sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang baru 3 bulan berada di Jambi, sekaligus menjalankan fungsi sebagai orang yang di amanahkan atau sebagai kawal depan Mahkamah Agung

pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan 10 Pengadilan Agama yang mewilayahi kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi;

Berlari tidak pakai lama memiliki beberapa gagasan gagasan yang mendukung Pembaharuan untuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berada di 1 Pemerintah Kota dan 9 Kabupaten Perovinsi Jambi, dan gagasan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut;

A. Menjalin Silaturahmi.

Silatuhrahmi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang telah di riwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa r.a berkata. “Pada hari Arafah disuatu petang kami sedang duduk mengelilingi Rasulullah saw, dan beliau bersabda, “ Jika ada orang yang memutuskan silatuhrahmi hendaklah meninggalkan majelis ini dan jangan duduk bersama kami, dan kegiatan untuk menjalin silatuhtami adalah perbuatan yang sangat baik, bagi orang yang ingin diluaskan rezekinya, jejak kikinya di kekalkan, serta mendapat saudara atau sahabat yang banyak . dan silaturahmi ke negeri serentak bak regam telah memberikan pencerahan baru bagi sejarah dan perjalanan peradilan agama dari masa kemasa, serta penyampaian tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama sebagai salah satu pilar pelaksana tugas kehakiman, sehingga dimasa yang akan datang masyarakat mengetahui dan masyarakat memahami tatacara penyelesaian konflik hukum ataupun meminta penetapan yang berhubungan langsung dengan tugas tugas peradilan agama, apalagi dalam era keterbukaan informasi, maka Pengadilan Agama telah menyiapkan beberapa pelayanan yang unggul seperti adanya sidang keliling yang dilakukan di daerah yang jauh dari kantor pengadilan dan akses masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dapat dilayani dengan baik, juga ada pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dan memperoleh pelayanan yang gratis dari pengadilan, serta biaya yang diperlukan untuk berpekerja tersebut dibayar oleh uang negara melalui anggaran yang disediakan di Pengadilan Agama.

B. Mempercepat Status Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara adalah bagian dari keuangan negara, secara normatif keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu hak berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, maka pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya, juga termasuk dari hibah, sumbangan, pelaksanaan perjanjian kontrak. Pertanggungjawaban barang milik negara suatu hal yang sangat penting karena sebagai bahan laporan melalui suatu unit akuntansi barang yang berjalan secara simultan untuk melakukan *chek and balance* antara arus uang dan arus barang sehingga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan sebagai alat untuk melakukan akuntabilitas barang dengan pelaksanaan APBN.

Kepastian status Barang Milik Negara yang berupa tanah dan gedung Pengadilan Agama masih memerlukan pendataan lanjutan, terutama terhadap tanah tempat berdirinya gedung kantor terdapat perbedaan kepemilikan, tanah masih berstatus pinjam pakai atas milik pemerintah daerah, sementara gedung dibangun atas dana Mahkamah Agung melalui APBN, berarti gedung Kantor dan Perumahan Milik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BMN tersebut tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya. Khusus BMN yang berada dalam penguasaan Perusahaan Negara, BHMN dan Lembaga lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

Batasan pengertian barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah :

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 hanya dibatasi yang berwujud (*tangible*) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Prioritas yang dicanangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan melakukan kegiatan silaturahmi dengan Pemerintah Daerah sekaligus membicarakan kepastian status bangunan kantor Pengadilan Agama Muara Bulian yang terletak di Jalan Pramuka Muara Bulian karena sangat di perlukan Pemerintah Daerah Muara Bulian untuk dipakai sebagai tempat kegiatan kedinasan, disisi lain tentu Pengadilan Agama Muara Bulian juga mendapat kompensasi yang menunjang tugas tugas pokok dan fungsi dengan tetap mengedepan *win win solution*, sehingga penertiban Barang Milik Negara ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama;

Pihak Pemerintah Daerah Muara Bulian telah memberikan tanggapan yang positif, sekaligus telah memberikan kemudahan fasilitas yang di perlukan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat Kabupaten Batang Hari, dapat dilihat bantuan nyata yang diberikan oleh Pemerintahan batang Hari berupa satu unit kendaraan Roda 4 yang telah diberikan untuk kedua kalinya, bahkan Pemerintah Kabupaten

Muara Bulian sebagai yang pertama kali memberikan dalam bentuk pinjam pakai kendaraan Roda 4 semenjak tahun 2004.

Sekarang Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian di Nakhoda oleh Drs. H. Yefferson, SH., MA yang berasal dari Kapau Kota Bukittinggi, yang pada awalnya pria berbadan sedang ini sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung, semenjak tanggal 28 Nopember 2012 telah menjadi orang Nomor 1 di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan beberapa gagasan yang akan membawa Pengadilan Agama Muara Bulian maju dan unggul dalam pelayanan, dengan dibantu oleh beberapa orang hakim yang cukup enerjik, serta seorang Panitera/ Sekretaris yang berasal dari Kumun Kerinci, dan telah malang melintang di wilayah Kalimantan Barat Pontianak, pria yang berbadan gempal ini adaah seorang pemikir pekerja ulet, serta terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana program S2 ilmu hukum salah satu universitas di Jambi ini dengan nama yang cukup dikenal yaitu Faizal, SH. yang telah mengabdikan di Pengadilan Agama Muara Bulian semenjak tanggal 17 Januari 2012. Kemudian tentu semua ini berkat kerja sama para pejabat kepanitraan dan kesekretariatan, pramu bhakti dan satuan tenaga pengaman yang tidak disebut satu persatu.

Sebelum berpamitan untuk kembali ke Jambi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi meresmikan peletakan batu pertama mushallah Al-Mizan yang akan dibangun secara bersama sama oleh keluarga besar Pengadilan Agama Muara Bulian, dan sebagai yang ikut dalam rombongan tersebut satu orang hakim tinggi Drs. H. Nasihin Mughni, MH, dan beberapa Punggawa jurdilaga PTA Jambi yaitu. Idris Latif, SH., MH, Dedi Erizal, SE, Joni Pebriadi Saputra, SH, Meiradinata, S.Ag sebagai Wakil Sekretaris, dan Hj. Mayatu Sophia, SH Kasubbag Umum PTA Jambi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam inventarisasi Barang Milik Negara.